

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Objek penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif deskriptif. Studi eksploratif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu (Sekaran, 2006). Ini sangat sesuai dengan penelitian ini, karena masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

Pada penelitian ini tidak terdapat isu populasi dan sampel, karena pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakter tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006). Sedangkan penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi karena penelitian ini merupakan studi eksploratif yang bertujuan untuk melihat akun-akun apa saja yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah partisipan (kabupaten/kota se-Provinsi Lampung) yang

memperoleh opini wajar dengan pengecualian dan permasalahan apa yang terdapat dalam akun-akun tersebut sehingga laporan keuangan pemerintah daerah partisipan memperoleh opini wajar dengan pengecualian serta untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daftar partisipan yang berpartisipasi dapat dilihat pada tabel 6 (Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung).

Tabel 6. Partisipan

No	Nama Kabupaten/Kota	Opini				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Prov Lampung	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
2	Kab Lampung Barat	WDP	WDP	WTP- DPP	WTP-DPP	WTP
3	Kab Lampung Selatan	WDP	WDP	WTP- DPP	WTP-DPP	WDP
4	Kab Lampung Tengah	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5	Kab Lampung Timur	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP
6	Kab Lampung Utara	WDP	WDP	TMP	WDP	TW
7	Kab Mesuji	-	-	WDP	TMP	WDP
8	Kab Pesawaran	-	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab Pesisir Barat	-	-	-	-	***
10	Kab Pringsewu	-	-	TMP	WDP	TMP
11	Kab Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kab Tulang Bawang Barat	-	-	WDP	WTP	WTP
14	Kab Way Kanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15	Kota Bandar Lampung	WDP	WDP	WTP- DPP	WTP-DPP	WTP
16	Kota Metro	WDP	WDP	WTP- DPP	WTP	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan/Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara LHP/IHPS I 2013 (www.bpk.go.id); Data diolah

— : Belum Dibentuk
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar

Pemilihan partisipan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung yang dapat dikumpulkan, yakni sebanyak tiga puluh tujuh (37) laporan hasil pemeriksaan keuangan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung).

3.2 Sempel dan Objek Penelitian

- Sempel penelitian
Sempel penelitian ini adalah pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung.
- Objek penelitian
Objek yang diteliti adalah laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung dari tahun 2008 sampai dengan 2012, dan data dari ikhtisar hasil pemeriksaan sementara semester I tahun 2013 (IHPS I, 2013).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung) dan studi literatur.

3.4 Metode Analisis

Analisis terhadap pengecualian dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dilakukan dengan menggunakan *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik sistematis dalam mengkategorikan kata menjadi kategori isi/muatan dengan-

menggunakan aturan pengkodean tertentu (Churyk et al. 2008). Secara umum menurut Palmquist ada dua tipe *content analysis* yaitu *conceptual analysis* dan *relational analysis*. Namun, secara tradisional *conceptual analysis* merupakan tipe *content analysis* yang paling sering digunakan. *Conceptual analysis* dapat digunakan untuk menentukan keberadaan dan frekuensi dari konsep yang ditampilkan dalam kata yang paling sering muncul dalam sebuah teks, dengan demikian dapat ditentukan berapa kali kata tersebut muncul. Carley (dalam Palmquist) menjelaskan langkah-langkah dalam *conceptual analysis* yang kemudian diimplementasikan dalam penelitian ini:

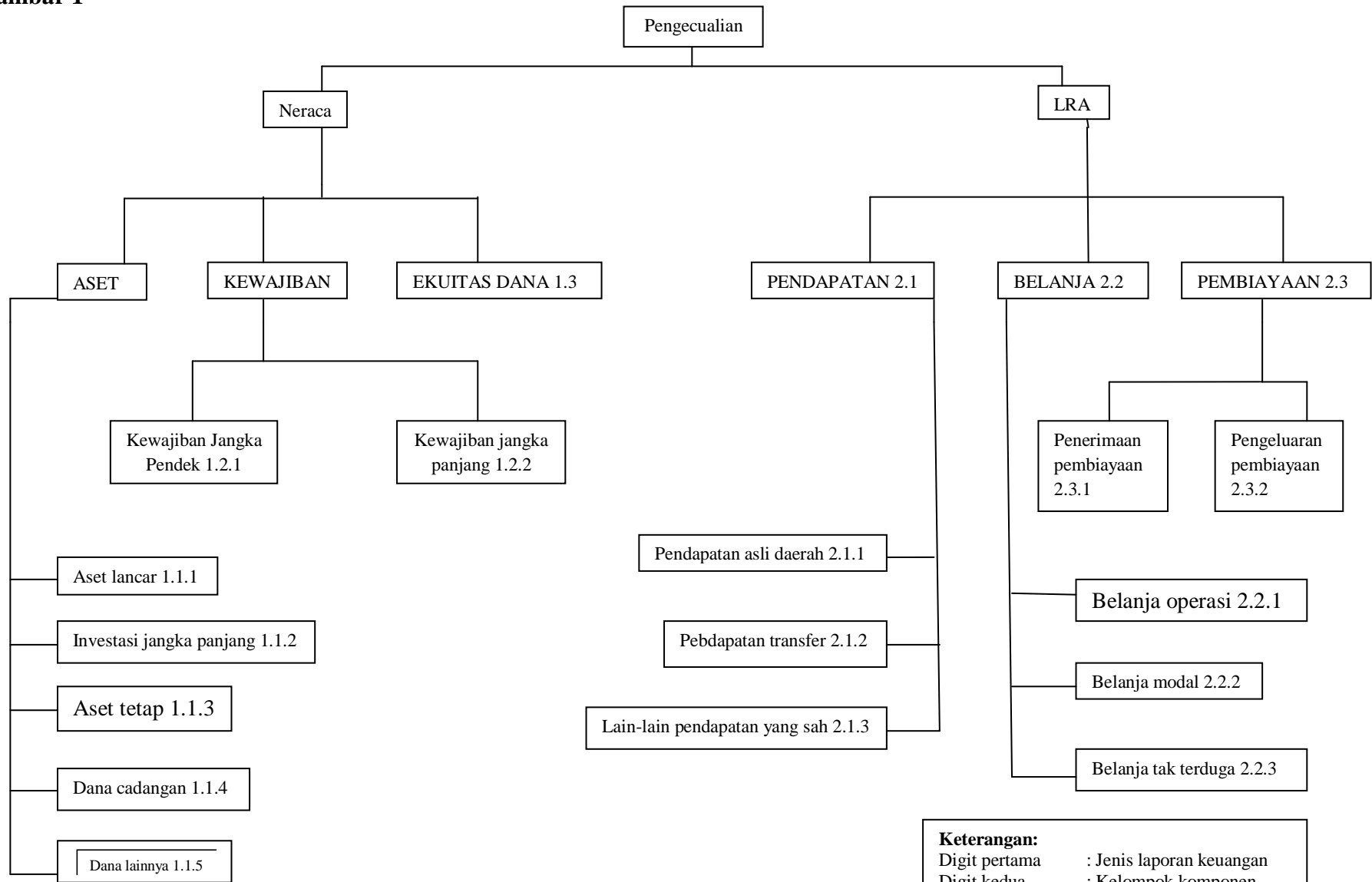
1. Menentukan level analisis

Dalam hal ini peneliti harus menentukan level analisis terhadap teks yang akan diteliti. Untuk pengecualian dalam laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian, pengkodean akan dilakukan terhadap nama akun yang muncul sebagai akun yang dikecualikan.

2. Menentukan berapa jenis konsep yang digunakan sebagai kode

Ada dua jenis konsep yang digunakan dalam pengkodean pengecualian ini. Pertama untuk pengkodean akun yang muncul sebagai akun yang dikecualikan dilakukan berdasarkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 1.

Gambar 1



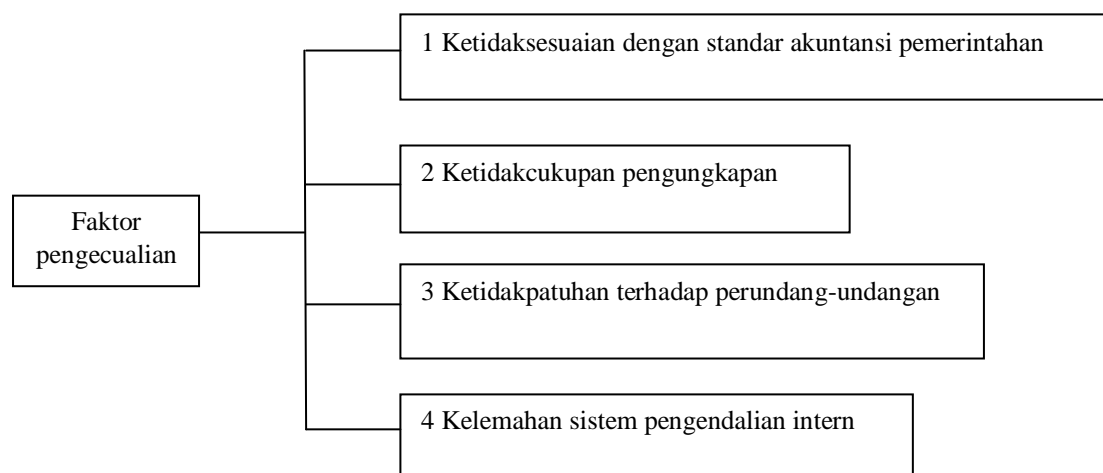
Sumber: Laporan hasil pemeriksaan (BPK RI, 2011)

Keterangan:
 Digit pertama : Jenis laporan keuangan
 Digit kedua : Kelompok komponen laporan keuangan
 Digit ketiga : Kelompok akun

Kedua, untuk pengkodean permasalahan yang terdapat dalam akun yang dikecualikan dilakukan berdasarkan kriteria kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern (BPK, 2011) dijelaskan dalam Gambar 2.

Gambar 2

Pengkodean Permasalahan dalam Akun yang Dikecualikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Partisipan yang Memperoleh Opini wajar dengan pengecualian (WDP). Berdasarkan Kriteria Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK, 2011)



Sumber: Laporan hasil pemeriksaan (LHP BPK, 2011)

3. Menentukan apakah kode dilakukan untuk eksistensi atau frekuensi dari konsep.

Pengkodean terhadap akun yang muncul sebagai akun yang dikecualikan dan permasalahan yang terdapat didalamnya dilakukan untuk mengetahui frekuensi kemunculan akun tersebut sebagai akun yang dikecualikan, dan frekuensi kemunculan permasalahan yang ada dalam akun yang dikecualikan tersebut.

4. Menentukan bagaimana membedakan diantara konsep

Pembedaan konsep untuk akun yang dikecualikan sangat jelas dalam Gambar 1, sedangkan untuk permasalahan yang ada dalam akun yang dikecualikan dilakukan berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

5. Menjelaskan aturan dalam pengkodean

Pengkodean akan dilakukan secara bertahap terhadap akun yang muncul sebagai akun yang dikecualikan sesuai dengan Gambar 1 yang telah disajikan sebelumnya. Tahap pertama dimulai dengan menentukan posisi akun yang dikecualikan pada jenis laporan keuangan pemerintah yang mana, tahap kedua ditentukan akun yang dikecualikan merupakan kelompok komponen laporan keuangan pemerintah yang mana, dan tahap ketiga ditentukan kelompok akun dari akun yang dikecualikan tersebut.

6. Menentukan apa yang akan dilakukan dengan informasi yang tidak relevan

Untuk informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka akan diabaikan saja.

7. Mengkodekan teks

Pengkodean pengecualian dilakukan secara manual dengan membuat resume pengecualian yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

8. Menganalisis hasil

Analisis hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.